



## KPK GELEDAH RUTAN SENDIRI BUNTUT PUNGLI HANYA FORMALITAS ATAU AGAR TUNTAS?

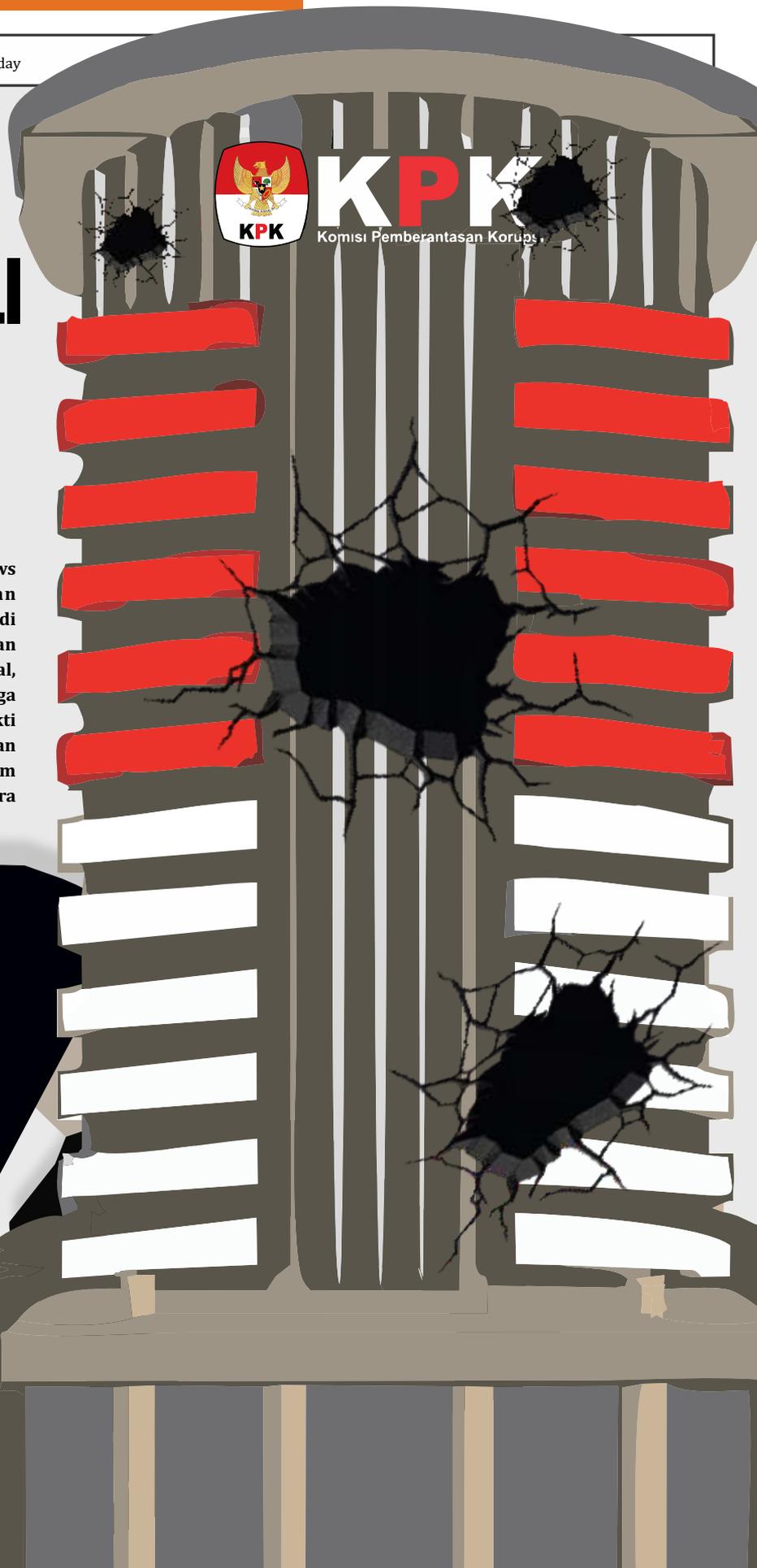
**B**anyak yang kecewa dengan keputusan 'antiklimaks' Dewan Pengawas KPK. Sebanyak 78 pegawai hanya dihukum menyampaikan permintaan maaf usai terbukti menerima pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK. Permintaan maaf yang tidak disiarkan langsung oleh televisi ataupun media sosial dinilai hanya teatrikal, tanpa pertobatan substansial. Terbaru, komisi antirasuah akhirnya juga menggeledah rutan-rutan sendirinya. Telah resmi disita sejumlah alat bukti terkait perkara pungutan liar oleh pegawai di instansi tersebut. Temuan tersebut selanjutnya akan dipelajari untuk kemudian disertakan dalam berkas perkara para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Semoga bukan sekadar formalitas.

Baca di hal 11....

### PEGAWAI RUTAN KPK YANG MENERIMA UANG PUNGLI DAN DISIDANGKAN DEWAS

- KLASTER 1**  
 Deden Rochendi total sekitar Rp 425.500.000  
 Agung Nugroho total sekitar Rp 182.000.000  
 Hijrial Akbar total sekitar Rp 111.000.000  
 Candra total sekitar Rp 114.100.000  
 Ahmad Arif total sekitar Rp 98.600.000  
 Ari Teguh Wibowo total sekitar Rp 109.100.000  
 Dri Agung S. Sumadri total sekitar Rp 102.600.000  
 Andi Mardiansyah total sekitar Rp 101.600.000  
 Eko Wisnu Oktario total sekitar Rp 95.600.000  
 Farhan bin Zabidi total sekitar Rp 95.600.000  
 Burhanudin total sekitar Rp 130.000.000  
 Muhammad Rhamdan total sekitar Rp 95.600.000
- KLASTER 2**  
 Muhamad Abduh total sekitar Rp 85.000.000  
 Suharian (2018-2022) total sekitar Rp 128.700.000  
 Gian Javier Fajrin total sekitar Rp 97.000.000  
 Sarifuddin (2019-2023) total sekitar Rp 95.100.000  
 Wardoyo (2019-2023) total sekitar Rp 72.600.000  
 Gusnur Wahid (2021-2023) total sekitar Rp 68.500.000  
 Firdaus Fauzi (2018-2022) total sekitar Rp 64.500.000  
 Ismail Chandra total sekitar Rp 30.000.000  
 Ari Rahman Hakim (2022-2023) total sekitar Rp 31.000.000  
 Zalnuri (2023) total sekitar Rp 8.500.000  
 Dian Ari Harnanto (2020) total sekitar Rp 4.000.000  
 Rohimah (2018-2023) total sekitar Rp 29.500.000
- KLASTER 3**  
 Muhammad Ridwan sekitar Rp 160.500.000  
 Ubaidillah total sekitar Rp 154.000.000  
 Rifki Rahmawanto total sekitar Rp 139.950.000  
 Tarmedi Iskandar total sekitar Rp 100.600.000  
 Asep Anzar total sekitar Rp 99.600.000  
 Ikhsanuddin total sekitar Rp 99.600.000  
 Maranatha total sekitar Rp 99.600.000  
 Eko Tri Sumanto total sekitar Rp 70.000.000  
 Mahdi Aris total sekitar Rp 96.600.000  
 Muhammad Faeshol A total Rp 96.600.000  
 Sopyan total sekitar Rp 88.600.000

Government (Hal.2)  
KPPU Curiga  
soal Beras Mahal,  
Bentuk Tim Khusus  
untuk Investigasi



# KPPU Curiga soal Beras Mahal Bentuk Tim Khusus untuk Investigasi

**JAKARTA-** Kenaikan harga beras di luar kewajaran membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun tangan. Dibentuk tim investigasi khusus untuk melakukan pengecekan.

"Kami sudah rapat komisi dan memutuskan membentuk tim investigasi khusus. Kita bicara indikasi kartel kan, tapi belum bisa kita simpulkan sehingga dengan adanya tim ini nantinya proses pengumpulan data dan informasi kita kumpulkan," ujar Anggota KPPU Hilman Pudjana usai menghadiri acara FGD Gejolak Harga Pangan Terutama Beras: Penyebab, Dampak, dan Solusi di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

"Dari pengumpulan data nanti akan bisa ditindaklanjuti kalau syaratnya kan kalau ada alat bukti. Intinya kenapa kita membentuk tim ini karena kami sudah melihat ada hal-hal yang tim KPPU perlu turun untuk melihat hal ini di sektor ini," sambungnya.

Tim investigasi ini pun nantinya akan disebar di berbagai wilayah kerja KPPU yang meliputi Medan, Lampung, Bandung, Balikpapan, dan Surabaya untuk melihat apakah pergerakan harga pada beras terjadi karena permasalahan suplai atau distribusinya.

Selain itu, KPPU juga akan melihat apakah kenaikan harga beras terjadi lantaran adanya sumbatan-sumbatan pada masalah distribusinya. "Nah kalau konteksnya sumbatan distribusi ini kan kita mesti lihat yah apakah ini dilakukan secara sporadis (tersebar) atau memang ada komunikasi antar pelaku usaha di channel distribusi baik di produsen atau distribusi," katanya.

"Kalau ada sumbatan-sumbatan



(Ilustrasi)Pekerja menata beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. (Dok.ist)

tersebut nanti kita akan lihat juga apakah ada komunikasi, ada kesepakatan antar pelaku usaha. Tentunya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kami sebagai KPPU yaitu penegakkan hukum, tentunya kita akan menindaklanjuti hasil-hasil temuan," pungkasnya.

## Jokowi: Cek di Pasar

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim harga beras sudah mengalami penurunan. Bahkan meminta agar semua pihak melakukan pengecekan langsung ke pasar-pasar induk beras seperti yang ada di Cipinang, Jakarta Timur dan Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya, coba dicek di Pasar Induk Cipinang, cek ke Pasar Johar, ini pasar-pasar beras harus dicek, coba dicek, coba kalian datang ke Pasar Cipinang cek harga turun apa naik. Cek di pasar Johar naik atau tidak,

turun atau tidak, cek," ungkap Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

"(Harga beras) Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek. Dan saya itu selalu mendapatkan angka-angka," tegasnya.

Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (PERPADI) sekaligus pedagang di Pasar Cipinang, Billy Haryanto, mengatakan harga jual beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur memang sudah mengalami penurunan. Ia menyebut sejatinya harga sudah turun tipis sejak dua minggu lalu.

"Kalau beras sudah turun harga, sudah 2 minggu inilah mulai turun. Turun tiap minggu lah Rp 400 (per kg), Rp 500 (per kg), sudah (turun harga) sampai 1.700 (per kg) lah saya hitung," kata Billy di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Menurutnya penurunan harga ini

terjadi karena di beberapa daerah penghasil beras mulai panen. Harga ini kemungkinan dapat terus turun hingga pertengahan bulan puasa nanti, berkat adanya panen raya.

"(Harga beras turun karena) sudah mulai panen, tapi belum raya (belum panen dalam jumlah besar). Nah sebentar lagi kan Pertengahan bulan puasa sudah panen raya," terangnya lagi.

"Harga beras sudah mulai normal cuma masih tinggi, tapi trennya turun. Nah bulan 4 itu panen raya, pasti turun. Jangan turun banyak, kasian petani. Paling nggak (harga gabah) Rp 7.000 lah, itu jadi beras Rp 14.000 per kg," tambah Billy.

Ia menjelaskan, sebelumnya harga beras sempat naik karena adanya kenaikan harga gabah di tingkat petani. Kenaikan harga gabah ini juga terjadi karena kurangnya produksi akibat el-nino.

Belum lagi, panen beras di awal tahun biasanya merupakan hasil tanam musim kemarau tahun sebelumnya. Karena padi-padi ini ditanam selama musim kemarau, tentu biaya penanamannya akan lebih mahal dari pada musim tanam utama atau penghujan. (Wid,rls,ant/dya)

○○○

## HARGA RATA-RATA DAN PERUBAHAN 28 FEBRUARI 2024

### BERAS KUALITAS BAWAH I

**Rp 14.550 per kg**  
↑ 1,39% - Rp 200

### BERAS KUALITAS BAWAH II

**Rp 14.350 per kg**  
↑ 1,41% - Rp 200

### BERAS KUALITAS MEDIUM I

**Rp 15.850 per kg**  
↑ 1,6% - Rp 250

### BERAS KUALITAS MEDIUM II

**Rp 15.700 per kg**  
↑ 1,29% - Rp 200

### BERAS KUALITAS SUPER I

**Rp 17.200 per kg**  
↑ 1,47% - Rp 250

### BERAS KUALITAS SUPER II

**Rp 16.650 per kg**  
↑ 1,22% - Rp 200

## 5 PROVINSI DI RI DENGAN HARGA BERAS TERMAHAL (PER 28/2/2024)



# Bawaslu Bak Tak Bertaji KPU Setengah Hati Jalankan Rekomendasi

**JAKARTA** - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menindaklanjuti rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), dan pemungutan suara lanjutan (PSL) secara keseluruhan.

"Dari total 1.692 rekomendasi tersebut, KPU menindaklanjutinya dengan melaksanakan PSU/PSL/PSS di 1.521 TPS. PSU terdapat 890 rekomendasi PSU dari Bawaslu, terbanyak di Papua Pegunungan 94, Papua 80, Sulawesi Selatan 70, Maluku 70, Nusa Tenggara Barat 53, Nusa Tenggara Timur 53, Sulawesi Tengah 42," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenti dalam keterangannya, Rabu (28/2/2024).

Lalu, untuk PSL terdapat 136 rekomendasi Bawaslu, terbanyak di Jawa Barat 43, Sumatera Selatan 21, DKI Jakarta 19, Banten 14.

Sedangkan, untuk PSS terdapat 666 rekomendasi Bawaslu, terbanyak di Papua Tengah 387, Jawa Tengah 114, Papua Pegunungan 99, Papua 39, dan Banten 18.

"Terhadap rekomendasi tersebut, KPU menindaklanjuti PSU, PSL, dan/atau PSS sebanyak 1.521 TPS. Terhadap 890 rekomendasi PSU, dilaksanakan PSU di 729 TPS (82 persen) dan tidak dapat dilaksanakan PSU di 84 TPS (9 persen)," ujar Lolly.

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakannya sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU," sambungnya.

Kemudian, terhadap 136 rekomendasi PSL, dilaksanakan PSL di 135 TPS (99 persen) dan tidak dapat dilaksanakan PSU di 1 TPS (1 persen). Tidak dapat dilaksanakannya PSU disebutnya berdasarkan kajian KPU yang tidak memungkinkan diselenggarakannya sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance).

"Terhadap 666 rekomendasi PSS, dilaksanakan PSU di 657 TPS (99 persen) dan tidak dapat dilaksanakan PSU di 9 TPS (1 persen). Tidak dapat dilaksanakannya PSS terjadi di 9 TPS di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua dikarenakan adanya konflik antar masyarakat yang hendak membagi surat suara antar caleg namun tidak ada titik temu, saat ini sedang proses penelusuran," sebutnya.

"Selain itu, terdapat 77 rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti (tidak mendapat surat balasan) terjadi di 4 Provinsi, yakni Sulawesi Tengah 3 (Banggai Kepulauan 1, Donggala 2), Jawa Barat 3 (Kota Bekasi 3), Maluku 23 (Kota Ambon 3, Seram



Bagian Barat 19, Maluku Tengah 1), dan Papua 48 (Kabupaten Jayapura)," sambung Lolly.

Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindak lanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Rekomendasi PSU di Kuala Lumpur, Bawaslu melalui Panwaslu Kuala Lumpur menyampaikan rekomendasi PSU pada metode pemilihan pos dan KSK melalui surat nomor 012/PM.05/K/02/2024 tanggal 13 Februari 2024.

Selain itu, Bawaslu juga menyampaikan surat nomor 200/PM.02/K1/02/2024 pada 14 Februari 2024 tentang surat permohonan tindak lanjut rekomendasi.

"Rekomendasi yang disampaikan Bawaslu berdasarkan hasil temuan nomor 002/Reg/TM/PL/PLN-Malaysia/Kuala Lumpur/II/2024 yang menyatakan terbukti sebagai pelanggaran administratif Pemilu dan selanjutnya merekomendasikan kepada PPLN Kuala Lumpur untuk melaksanakan tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur," ujarnya.

"Tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling (KSK) di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling," sambungnya.

Berikutnya, pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud huruf c, didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK.

Tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling sebagaimana poin c;

Selanjutnya, mengevaluasi metode

pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama.

"Tindakan lanjut rekomendasi ini, KPU telah melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu dan Kementerian Luar Negeri terkait persiapan PSU. Koordinasi di antaranya KPU memvalidasi permasalahan dengan merunut kronologi permasalahan mulai penyediaan DP4LN, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, pemungutan POS, KSK, dan TPS," ungkapnya.

"Untuk selanjutnya menjadi data pemilih yang akan melakukan pemungutan suara ulang. Terhadap hal ini, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan pemungutan suara ulang. Tujuannya, mengawal kemurnian pemilih hak pilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

## Sudah 3 Surat soal Sirekap

Bawaslu juga sudah tiga menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan permasalahan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

Hal itu diungkapkan Komisioner Bawaslu Lolly Suhenti dalam rapat pleno terbuka perhitungan suara tingkat nasional di Kantor KPU pada Rabu (28/2/2024). Saat itu, saksi dari PDI Perjuangan (PDIP) meminta tindakan tegas dari Bawaslu terkait Sirekap yang sering bermasalah.

"Bawaslu sudah berkirim surat kepada KPU sebanyak tiga kali. Pertama, tanggal 13 Februari sebelum hari pemungutan suara yang pada intinya mempertanyakan, menegaskan kembali soal akses kepada Bawaslu terhadap Sirekap," ungkap Lolly.

Surat kedua Bawaslu kirim untuk merespons banyaknya data anomali di aplikasi Sirekap. Apalagi, banyak yang

menganggap data di Sirekap menjadi basis penetapan hasil pemilu.

Oleh sebab itu, Bawaslu meminta KPU agar menegaskan kepada masyarakat luas bahwa Sirekap hanya sekadar alat untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sementara hasil pemilu tetap berdasarkan perhitungan berjenjang dari tingkat kecamatan hingga pusat.

"Surat kedua 17 Februari, yaitu mengingatkan KPU bahwa Sirekap adalah alat bantu, sehingga sebagaimana mestinya alat bantu tidak mengalahkan proses manual berjenjang yang kita lakukan," ujarnya.

Surat terakhir Bawaslu dilayangkan pada 19 Februari. Di surat ketiga itu, Bawaslu meminta penjelasan KPU terkait adanya kabar penundaan rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan alasan untuk optimalisasi Sirekap.

Lolly menyebut, KPU memberikan jawaban atas surat yang dikirim pada kedua dan ketiga. Menurutnya, KPU menyatakan tidak pernah menunda rekapitulasi namun hanya optimalisasi Sirekap.

Dia mengaku, Bawaslu sudah sejak lama mengingatkan kepada KPU terkait polemik Sirekap tersebut.

"Terhadap karut marutnya informasi berkenaan dengan akurasi Sirekap, kami menginstruksikan jajaran pemilu untuk selalu melakukan pengawasan melekat dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk menyandingkan C.Hasil, C.Hasil salinan, dan Sirekap. Tiga ini kemudian kami mintakan untuk selalu disandingkan," pungkasnya.(wid,rls,ist/dya)

## BAWASLU VS KPU

Dari total 1.692 rekomendasi tersebut, KPU menindaklanjutinya dengan melaksanakan PSU/PSL/PSS di 1.521 TPS.

### PSU

- Terdapat 890 rekomendasi PSU dari Bawaslu, terbanyak di Papua Pegunungan 94, Papua 80, Sulawesi Selatan 70, Maluku 70, Nusa Tenggara Barat 53, Nusa Tenggara Timur 53, Sulawesi Tengah 42

- Dilaksanakan PSU di 729 TPS (82 persen) dan tidak dapat dilaksanakan PSU di 84 TPS (9 persen)

### PSL

- Terdapat 136 rekomendasi Bawaslu, terbanyak di Jawa Barat 43, Sumatera Selatan 21, DKI Jakarta 19, Banten 14.

- Dilaksanakan PSL di 135 TPS (99 persen) dan tidak dapat dilaksanakan PSU di 1 TPS (1 persen).

### PSS

- Terdapat 666 rekomendasi Bawaslu, terbanyak di Papua Tengah 387, Jawa Tengah 114, Papua Pegunungan 99, Papua 39, dan Banten 18.

- Tidak dapat dilaksanakannya PSS terjadi di 9 TPS

# BMKG : Cuaca Ekstrem Mengancam Jatim hingga 3 Maret

**SURABAYA** – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, Sidoarjo, mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Jawa Timur agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem hingga 3 Maret 2024 mendatang.

Kepala BMKG Juanda, Taufiq Hermawan, mengatakan potensi cuaca ekstrem dapat menyebabkan berbagai bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat, tanah longsor, angin kencang, puting beliung sampai hujan es. "Saat ini wilayah Jawa Timur telah memasuki puncak musim hujan," kata Taufiq, dikutip dari liputan6.com, Rabu (28/2/2024).

Dia menambahkan, suhu muka laut di perairan Jawa Timur yang hangat mengakibatkan peningkatan pasokan uap air di atmosfer. Pola pertemuan angin di sepanjang wilayah Jawa Timur serta didukung kondisi atmosfer yang labil dan lembab mulai lapisan bawah hingga atas.

Hal itu menyebabkan penumpukan massa udara basah sehingga terbentuk awan-awan konvektif yang masif di wilayah Jawa Timur. Fenomena itu yang berpotensi menimbulkan cuaca ekstrem di sebagian besar daerah di provinsi ini.

Daerah yang berpotensi mengalami cuaca ekstrem yakni Bangkalan, Banyuwangi, Kota Batu, Kota/Kabupaten Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kota/Kabupaten Kediri, Lamongan, Lumajang, Kota/Kabupaten Madiun, Magetan, Ponorogo, Kota/Kabupaten Malang.

Kemudian, Surabaya, Kota/Kabupaten Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Kota/Kabupaten Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung, Kota/Kabupaten Probolinggo, Bondowoso, Jember, Pacitan.

BMKG Juanda mengimbau seluruh masyarakat di wilayah itu agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem. Termasuk potensi bencana hidrometeorologi sebagai dampaknya.

BMKG Juanda juga mengimbau instansi pemerintah turut serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Terutama di wilayah yang memiliki topografi curam maupun bergunung dan tebing perbukitan agar lebih waspada.

Kawasan seperti itu rentan mengalami banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang akibat yang ditimbulkan cuaca ekstrem. Masyarakat bisa memantau perkembangan kondisi cuaca berdasarkan citra radar cuaca WOFI di laman resmi BMKG Juanda.

Terkait dengan hal itu, Kalaksa BPBD (Badan Penanggulangan Bencana daerah) Jawa Timur (Jatim) Gatot Soebroto meminta kabupaten/kota meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, cuaca ekstrem masih



Ilustrasi cuaca ekstrem angin kencang.

mengintai di sejumlah daerah.

Seperti dalam perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, hingga bulan Maret akan ada potensi cuaca ekstrem. "Dalam beberapa waktu ini, cuaca ekstrem telah mengakibatkan banjir, longsor dan angin kencang di beberapa daerah. Karena itu, kami mohon BPBD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaannya hingga Maret mendatang," imbau Gatot Soebroto, dikutip dari beritajatim, Rabu (28/2/2024).

Gatot mengungkapkan, cuaca ekstrem yang terjadi dalam sepekan terakhir telah mengakibatkan bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah, baik yang berupa, banjir, tanah longsor, angin kencang, angin puting beliung dan bahkan hujan es.

"Kami minta kepada semua masyarakat untuk berhati-hati, utamanya saat terjadi hujan lebat disertai angin kencang. Hindari berteduh di bawah pohon. Jangan sampai pohon tempat kita berteduh itu akhirnya patah dan menimpa kita sendiri," pesannya.

Terkait potensi bencana angin kencang, diungkapkannya bahwa bencana ini telah mengalami peningkatan eskalasi dalam beberapa pekan terakhir. Berdasar data Pusdalops BPBD Jatim per 28 Februari 2024, dalam dua bulan terakhir, jumlah kejadian bencana angin kencang di Jatim telah mendominasi dengan jumlah 47 kejadian.

Sedang, banjir hanya tercatat 25 kejadian. Disusul angin puting beliung dan tanah longsor yang masing-masing 3 dan 2 kejadian. Bencana angin kencang yang cukup besar, di antaranya, terjadi di wilayah Sidoarjo dan Kabupaten Pamekasan.

Di dua lokasi ini, ratusan rumah mengalami kerusakan dengan kategori berat, sedang dan ringan. Kalaksa BPBD Jatim pun sempat turun langsung ke lokasi untuk meninjau dan menyerahkan bantuan perbaikan.

Saat Rakor Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi yang dihadiri Kalaksa BPBD Kabupaten/Kota se-Jatim akhir pekan lalu, Kalaksa Gatot Soebroto juga telah menyampaikan imbauan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaannya akan cuaca ekstrem.

"Semua kebutuhan logistik dan peralatan juga sudah kita dorong ke daerah, agar teman-teman kabupaten/kota bisa merespon cepat saat terjadi bencana," imbuhnya.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beberapa waktu lalu menyatakan bahwa dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, setidaknya 27 di antaranya telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pun meminta segenap komponen pemangku kebijakan di wilayah Jawa Timur untuk mewaspadai puncak musim hujan pada awal 2024.

"Berdasarkan prediksi curah hujan pada 2024 oleh BMKG, Jawa Timur menjadi salah satu wilayah dengan puncak musim hujan di bulan Februari," ujarnya saat Rapat Koordinasi Antisipasi dan Siaga Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 di wilayah Provinsi Jawa Timur, dikutip dari Kompas.

Potensi yang perlu diwaspadai di Jatim yakni terutama soal bencana banjir dan tanah longsor. Tidak hanya Jatim, tapi sejumlah provinsi lain juga harus waspada. "Prediksi ini wajib ditindaklanjuti dengan langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan daerah," papardia.

Adapun sejumlah langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak dari bencana hidrometeorologi basah yakni pertama, lakukan penanaman vegetasi dan pemangkasan ranting pohon yang rentah patah. "Langkah selanjutnya yakni memperkuat tanggul sungai dan lereng serta pembersihan drainase," terangnya.

"Perhatikan dan lakukan penataan

pemukiman di sepanjang bantaran sungai dan kembangkan jaringan komunikasi sebagai suatu sistem peringatan dini berbasis masyarakat sehingga jika terjadi potensi bahaya, informasinya dapat langsung diketahui warga setempat," tambahnya.

Suharyanto turut mengingatkan penetapan rambu rawan bencana dan jalur evakuasi serta pengerukan sedimen sungai yang berguna untuk restorasi daya tampung debit air. "Terakhir, upaya melalui teknologi modifikasi cuaca (TMC) juga dapat dilakukan untuk mengurangi intensitas curah hujan yang melanda wilayah dengan ancaman bencana banjir dan tanah longsor," katanya lagi.

"Meski prediksi di bulan Februari, tidak berarti kewaspadaan kita menurun pada bulan-bulan selanjutnya. Selalu tingkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan karena bencana dapat terjadi kapan saja," imbuh dia.

Diketahui, guna memberikan dukungan dalam upaya mitigasi dan penanganan darurat bencana hidrometeorologi di Jawa Timur, BNPB telah menggelontorkan Bantuan Operasional Dana Siap Pakai (DSP) untuk provinsi dan seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur yang telah menetapkan status siaga dan tanggap darurat bencana hidrometeorologi basah masing-masing sebesar Rp 250.000.000.

Sementara itu, salah satu daerah yang tergolong rawan bencana khususnya longsor adalah Kabupaten Magetan. Bahkan, setidaknya sudah ada 14 kejadian tanah longsor di wilayah tersebut mulai Januari 2024 hingga 28 Februari 2024. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Magetan mencatat, kejadian longsor tersebut 10 kali terjadi di bulan Januari, dan sisanya di Februari.

"Mayoritas kejadian longsor di kecamatan Poncol, Plaosan, Sidorejo, dan Parang," terang Yok Sujarwadi, Plt Kalaksa BPBD Magetan, dikutip dari beritajatim, Rabu (28/02/2024).

Keempat wilayah kecamatan tersebut terdampak longsor lantaran letak geografis di kawasan pegunungan. Dari 14 kejadian itu, salah satu diantaranya mengakibatkan korban jiwa pada 6 Januari 2024. Yakni, seorang bocah yang tinggal di Kelurahan/Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

Kemudian, beberapa diantaranya mengakibatkan kerugian materiil karena mengakibatkan kerusakan bangunan dan kendaraan. Terakhir, longsor terjadi di Dusun Wonomulyo Desa Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan pada Selasa (27/02/2024). Material longsor menimpa satu unit motor yang parkir di talud lahan yang longsor tersebut. (lut/dya)

# Ratusan Banser Geruduk Pendopo Pasuruan Tuntut Penggantian Pj Bupati



Ratusan anggota Banser geruduk Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Kabupaten Pasuruan, Rabu (28/2/2024).

**PASURUAN** – Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Kabupaten Pasuruan, Rabu (28/2/2024) pagi, mendadak ramai dengan kehadiran ratusan anggota Banser. Mereka menggeruduk Pendopo untuk menuntut pertanggung jawaban Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto, atas pencoretan gambar wajah Irsyad Yusuf, mantan Bupati Pasuruan yang tertera di dalam cup kopi kapiten Pasuruan.

Dikutip dari pasuruan.inews.id, massa Banser yang berjumlah sekitar 200 orang itu berteriak meminta Pj Bupati Pasuruan supaya meminta

maaf atas pencoretan gambar wajah Gus Irsyad yang tak lain adalah Kasatkorwil Banser Jawa Timur.

Ratusan Banser ini datang ke Pendopo mulai sekitar pukul 08.00 hingga 10.00 WIB. Di depan Pendopo, Banser yang datang dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pasuruan ini menggelar berbagai orasi.

Setelah puas, kemudian menuju kompleks perkantoran Pemkab Pasuruan di Raci, Bangil. Mereka

berorasi di gedung putih perkantoran Raci, Kabupaten Pasuruan. Namun, di tempat ini mereka meneriakkan seruan untuk mengganti Pj Bupati Pasuruan. “Ganti, ganti, ganti Pj Pasuruan,” teriak para anggota Banser dengan nada ala pasukan khusus.

Untuk diketahui, suhu politik Kabupaten Pasuruan sedang panas. Bukan karena sengketa Pemilu 2024, tapi karena insiden pencoretan gambar wajah mantan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf pada cup kopi. Parahnya, cup gelas kopi bergambar wajah dicoret tersebut disajikan untuk tamu sidang paripurna LKPI Bupati

Pasuruan di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (26/2/2024).

“Saya tahu itu perintah Pj (Bupati Pasuruan, Andriyanto),” ungkap Irsyad Yusuf dikutip dari laman Mili.id, Selasa (27/2/2024).

**Lenteratoday.com juga menerima pernyataan sikap Banser yang berisi 4 poin tuntutan. Antara lain:**

- Meminta Pj Bupati Pasuruan secara langsung bukan Sekda atau Kepala dinas Pemkab Pasuruan untuk meminta maaf secara terbuka atas apa yang sudah dilakukan terhadap Pimpinan kami dan Kasatkorwil Banser Jawa Timur, Gus Irsyad Yusuf, karena secara tidak langsung telah mencoreng marwah dan nama besar organisasi kami. Jajaran Banser Se-Jawa Timur Tidak Terima dengan pelecehan kepada komandan kami.

- Meminta kepada Pj Bupati Pasuruan, untuk tidak membuat gaduh Kabupaten Pasuruan yang selama ini kondusif dengan pernyataan yang mengarah ke adu domba.

- Mendesak Pj Bupati Pasuruan untuk melaksanakan tugas nya sesuai kewenangan sebagai Pj Bupati dan tidak merubah arah kebijakan dan

Mengevaluasi Kebijakan Pemerintahan sebelumnya serta mempertahankan Program WAK MUQIDIN, untuk kepentingan pendidikan Alquran di Kabupaten Pasuruan, seperti halnya branding kopi kapiten untuk kemashlahatan kabupaten Pasuruan

- Mendesak Pj Gubernur Jawa Timur dan Menteri Dalam Negeri untuk mencopot dan mengganti Pj Bupati Pasuruan karena telah membuat gaduh dan tidak kondusif situasi Masyarakat di Kabupaten Pasuruan dengan pernyataan dan kebijakannya.

Pernyataan sikap tersebut juga disampaikan saat berorasi di Pendopo Kabupaten Pasuruan dan Perkantoran Raci, Bangil. Bahkan, mereka akan mengerahkan massa yang lebih besar apabila pernyataan sikapnya tidak ditindaklanjuti.

Sementara itu, dikutip dari pasuruankab.go.id, Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan, Andriyanto menegaskan, tidak ada unsur kesengajaan dalam penyamaran wajah Gus Irsyad pada coffee cup Kapiten (Kopi Khas Kabupaten Pasuruan). Pernyataan klarifikasi itu disampaikan di hadapan Banser Kabupaten Pasuruan dan insan media, Rabu (28/2/2024). (lut/dya)

## Universal Coverage BPJS Ketenagakerjaan di Jatim Masih Rendah

**SURABAYA**– Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan bahwa Universal Coverage untuk para pekerja di Jawa Timur masih cukup rendah. Untuk itu dia mendorong seluruh stakeholder baik Pemerintah Daerah dan swasta terus memaksimalkan program jaminan sosial hingga terwujud universal coverage para pekerja.

Berdasarkan data BPS yang diolah Bappenas pada bulan Desember tahun 2023, jumlah penduduk potensi peserta di Jawa Timur sebesar 14,8 juta orang, dan yang sudah terlindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan per Desember 2023 sebanyak 5,07 juta orang atau 31,7 persen.

Dari 31,7 persen tersebut telah mendapatkan perlindungan dasar dengan rincian, 3,3 juta orang tenaga kerja penerima upah, 1,03 juta orang tenaga kerja bukan penerima upah, sedangkan untuk tenaga kerja konstruksi terdapat 737,8 ribu orang.

Dari data tersebut, Adhy menyampaikan bahwa coverage perlindungan jaminan sosial di Jawa

Timur masih tergolong rendah. Oleh karenanya berbagai upaya program pemerintah dalam mendukung meningkatkan Universal Coverage. Salah satunya dengan program penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan atau Paritrana Award.

“Kalau di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahap per tahap sampai kepada 100 persen Universal Coverage, maka ini seiring dengan kebijakan kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin tinggi dan kemiskinan semakin turun,” kata Adhy dalam sambutannya saat menghadiri acara Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award Tahun 2023 Provinsi Jawa Timur di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (28/2/2024).

Lebih lanjut, Adhy mengatakan dengan terciptanya Universal Coverage diharapkan berseiring juga dengan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Jawa Timur, yang dalam proses

pelaksanaannya harus dilakukan melalui sinergitas, kolaborasi dan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat.

“Sinergitas dan kolaborasi dari seluruh pihak harus terus ditingkatkan, baik itu BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya. Sehingga tujuan mewujudkan Universal Coverage bisa tercapai menuju keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat Jawa Timur,” ungkapnya.

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama BPJS Ketenagakerjaan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan pelaku usaha yang memiliki komitmen terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Timur.



Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono saat memberikan sambutan dalam acara Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award Tahun 2023 Provinsi Jawa Timur di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (28/2/2024).

“Di mana ini sebagai wujud kehadiran negara bagi pekerja khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan pekerja dan mencegah potensi kemiskinan baru,” imbuhnya. (lut/dya)

## Proyek Jalan Kabupaten Malang

# Dinas PU Bina Marga Bidik Peningkatan Persentase Kemantapan

**MALANG** - Menyusul hasil inventarisasi pekerjaan jalan tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang diketahui telah melakukan penanganan dan pemeliharaan rutin pada sekitar 420 Km jalan. Dengan komitmen untuk meningkatkan infrastruktur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Khairul Isnadi Kusuma menegaskan, peningkatan kualitas jalan akan menjadi fokus utamanya di tahun 2024 ini.

Pria yang akrab dengan sapaan Oong ini menyebutkan, target peningkatan persentase Jalan Mantap dari 73 persen menjadi minimal 75 hingga 80 persen pada tahun 2024.

"Kalau 2024 akan saya cek lagi. Karena kan belum tentu dengan anggaran yang sama. Misalnya menangani ruas yang sama, kan di situ ada yang (pemeliharaan) rutin sekian kilo meter, kemudian ada yang peningkatan. Karena kalau peningkatan kualitas jalan, otomatis anggarannya juga lebih besar, pelebaran pun lebih besar biayanya. Nanti saya pastikan untuk data itu," ujar Oong, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (28/2/2024).

Oong menambahkan, estimasi anggaran yang dibutuhkan dalam pengembangan infrastruktur jalan di

2024 ini sekitar Rp 300 miliar. Dalam konteks ini, Ia mengaku optimistis dapat memperoleh dukungan dana yang telah diajukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Jika usulan tersebut disetujui, menurutnya dana ini akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur jalan di 3 ruas, yaitu mencakup ruas Kalipare-Donomulyo, Panjen-Pagak, dan Pagak-Sumbermanjing Kulon (Sumakul).

"Nah kalau itu disetujui, nanti anggaran APBD yang kita tanamkan untuk 3 ruas itu akan kita alihkan ke yang lain. Sehingga otomatis panjang (jalan) yang tertangani ini kan baru ketahuan, makanya saya belum bisa jawab. Nah nanti kalau misal Inpres ini disetujui, terus mana yang bisa masuk ke ruas jalannya, itu kan ketahuan penanganan jalan yang ditangani oleh APBD berapa kilo, gitu," tambahnya.

Lebih lanjut terkait keputusan dana Inpres, Oong menjelaskan bahwa perkiraan keputusan akan keluar pada rentang waktu Februari-Maret 2024 ini. Namun selain mengandalkan bantuan pusat, Ia juga merinci adanya alternatif lain untuk mendapatkan dukungan finansial, yaitu melalui

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Meskipun masih dalam tahap penajakan, Oong mengaku telah berdiskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait potensi kerjasama tersebut. "Karena kalau dari Bappenas mengusulkan jangan semata-mata jalan saja, tapi dibundling dengan wisata. Selanjutnya dihybridkan lagi, misal Rp 10 miliar, itu Rp 6 miliar dari APBN dan sisanya dari APBD. Itu baru saya konsultasikan ke Bapenas. Sehingga gak memberatkan APBD daerah," terang Oong.

Mengenai penerapan strategi bundling dan hybrid dalam proyek-proyek jalan di Kabupaten Malang ini, Oong menjelaskan, jika pengembangan infrastruktur jalan dengan skema bundling ini dilakukan pada ruas jalan strategis. Maka Pemkab Malang dapat memanfaatkan beberapa titik jalan tersebut untuk penyewaan reklame. Dimana sumber pendapatan dari sewa reklame tersebutlah yang digunakan untuk



Kondisi jalan di salah satu wilayah Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. (Dok. Istimewa)

membayar angsuran proyek bundling.

"Tapi kita masih koordinasikan dengan BKAD. Hasil dari pariwisata itu juga bisa digunakan untuk membayar angsuran. Itu namanya bundling dan hybrid, sehingga membayar angsuran gak seberat itu karena ada angsurannya. Efektif dan efisien kan seperti itu. Insyaallah saya yakin bisa tahun ini," ungkap Oong. (Santi/Dya)

## Hadapi Tantangan Perubahan Iklim

# DLH Kota Malang Gencarkan Program Kampung Iklim



Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, secara simbolis memberikan alat edukasi satu paket kepada perwakilan salah satu RW Proklim, Rabu (28/2/2024). (Santi/Lenteratoday)

**MALANG** - Menyikapi tantangan perubahan iklim, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang semakin gencar memperkuat pentingnya Program Kampung Iklim (Proklim). Hal ini disampaikan melalui kegiatan sosialisasi bertajuk 'Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim'.

Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Widjaya mengatakan, kegiatan semacam ini sejatinya telah menjadi bagian rutin yang terlaksana

di tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, meskipun beberapa tahun terakhir jumlah Proklim di Kota Malang masih mengalami fluktuasi, ia mengaku optimis program ini dapat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Malang.

"Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh DLH Kota Malang untuk memicu kesadaran masyarakat dalam memitigasi dampak-dampak perubahan iklim. Sehingga melalui kegiatan semacam ini kami berharap bisa menambah kesadaran kita, khususnya warga Kota Malang untuk mengetahui bagaimana pentingnya menyediakan lingkungan yang harus menerapkan proklim-proklim di masing-masing lingkungan," ujar Rahman, ditemui usai membuka sosialisasi tersebut, Rabu (28/2/2024).

Rahman menambahkan, sosialisasi yang diikuti oleh perwakilan masyarakat dari 57 kelurahan se Kota Malang ini menjadi poin utama. Karena menurutnya kesadaran lingkungan dianggap sebagai kebutuhan mutlak. Terlebih di tengah kondisi penghijauan yang

semakin menyusut di kawasan perkotaan, program ini diharapkan mampu mengajak warga Kota Malang untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat.

"Karena lingkungan yang baik itu yang memberikan kegiatan penghijauan yang baik, ada kegiatan penanaman, ada kegiatan yang semuanya berharap untuk menjadikan lingkungan di wilayah itu menjadi lebih baik," ungkap Rahman.

Diketahui, dalam sosialisasi tersebut juga dilaksanakan pemberian secara simbolis satu paket alat stimulus, yakni termasuk plakat penunjuk arah, tong penadah air hujan, dan banner media edukasi.

Kabid Tata Lingkungan DLH Kota Malang, Tri Santoso menjelaskan, penyerahan simbolis alat-alat ini diberikan kepada perwakilan dari 18 Kelurahan yang dianggap mampu menerapkan Proklim di Kota Malang. Menurutnya, Proklim bukan hanya bertujuan sekadar menanam pohon, melainkan mendukung aspek multidimensi, seperti pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat, dan urban farming.

"Nah bahan-bahan yang kami serahkan tadi, itu sebagai stimulus. Contohnya kan ada tong itu, itu untuk

menampung air hujan. Kenapa? karena sekarang ini di beberapa wilayah Kota Malang masih belum dilayani PDAM, sehingga masyarakat tentu membutuhkan akses air bersih ini. Harapannya kalau ini disadari masyarakat maka harapannya mereka bisa melakukan itu. Kan ini perlu contoh, perlu stimulus," terang Trisan.

Lebih lanjut, Trisan juga menjelaskan bahwa adaptasi pada perubahan iklim, juga mengharuskan masyarakat untuk dapat memitigasi bencana yang kemungkinan terjadi. Oleh karena itu, DLH Kota Malang juga memberikan rambu-rambu, seperti titik kumpul dan evakuasi, dengan tujuan memandu masyarakat pada saat bencana. Fokusnya terletak pada upaya menjaga jalur evakuasi agar mobilitas masyarakat tidak tersebar ke segala arah.

"Ini tadi untuk 18 kelurahan yang termasuk juga 30 an RW. Ini kan program partisipatif, jadi kami gak bisa memaksa mereka, kita hanya mengajak. Tapi kami yakin bahwa dengan mengikuti ini, dampaknya akan sangat dirasakan oleh lingkungan masyarakat. Akan menciptakan iklim mikro yakni suatu kondisi iklim yang ada di satu wilayah itu saja. Karena semakin banyak pohon kan udara semakin bersih, sejuk," terangnya. (Santi/Dya)

# RUY ISKANDAR

## AKTOR KETURUNAN INDONESIA MAIN DI AVATAR

**SERIAL** Avatar: The Last Airbender memiliki banyak fakta menarik untuk diketahui oleh penonton.

Siapa sangka ternyata salah satu pemainnya ada aktor asal Indonesia. Ia adalah Ruy Iskandar.

Ruy Iskandar memiliki peran sebagai prajurit bernama Letnan Lee dari Negara Api. Ia pun berada di bawah kendali Pangeran Zuko, dan ikut memburu Avatar Aang.

Ruy Iskandar merupakan aktor keturunan Indonesia yang lahir pada 1984. Ternyata ia sudah lama berkecimpung di dunia hiburan.

Sebelum main serial Netflix ini, ia pernah ikut main di beberapa film dan serial lain.

Melansir dari catatan Rotten Tomatoes, Ruy juga pernah bermain film bersama dengan Jenna Ortega.

Aktingnya ini dialami sejak ia masih duduk di bangku SMA. Ruy kemudian ikut Program Akting di Universitas New York.

Ia pun lulus pada 2010, dan langsung aktif di bermain peran di atas panggung. Debut pertamanya saat itu di Chicago dan New York.

Karena kegigihannya, ia juga sempat ikut bermain serial The Blacklist (2013), Gotham (2014), dan Benders (2015).

Dikutip dari situs Rotten Tomatoes, Ruy Iskandar sudah menyukai dunia akting sejak dirinya duduk di bangku SMA di Indonesia.

Ruy yang begitu menyukai dunia seni peran akhirnya menyelesaikan program akting pascasarjana di Universitas New York.

"Dia mengambil kelas teater karena menurutnya itu mudah dan akhirnya terpesona oleh seni tersebut. Dari sana, ia tertarik pada akting, akhirnya menyelesaikan Program Akting Pascasarjana Universitas New York," begitu informasi yang dikutip dari Rotten Tomatoes.

Ruy Iskandar lulus pada 2010 dan kemudian naik ke panggung untuk pertama kalinya untuk tampil dalam pertunjukan teater di Chicago dan New York.

Sementara dilansir Goodman Theatre, Ruy Iskandar diketahui pernah tampil di Broadway melalui Macbeth. The Dance and the Railroad (Signature Theatre), Measure for Measure (Public Theater), The Hunters (Cherry Lane Theatre), Purim Play (Classic Stage Company), You for Me for You (Ma-Yi Theater Company) dan Hamlet, 'Tis Pity She's a Whore, hingga The Storm and The Hot L Baltimore (NYU) merupakan beberapa kreditnya di luar Broadway.

Kegigihan dan konsistensi untuk berkarier di dunia akting membawa Ruy berhasil menembus sejumlah judul film Hollywood.

Ruy sempat muncul singkat dalam serial The Blacklist (2013) dan Gotham (2014). Di samping itu, Ruy Iskandar pernah berperan sebagai

Sebalos dalam sitkom Benders (2015). Sementara pada 2021,

Ruy Iskandar juga membintangi film Yes Day bersama Jenna Ortega. Terbaru, ia membintangi serial Netflix, live action Avatar: The Last Airbender (2024).

Kini nama Ruy Iskandar semakin dikenal luas seiring kemunculannya dalam serial Avatar: The Last Airbender versi live action.

Dalam serial tersebut, Ruy Iskandar hadir sebagai Letnan Jee yang ditugaskan untuk mengikuti Pangeran Zuko yang diasingkan.

Loyalitas Letnan Jee terhadap Pangeran Zuko diuji melalui perjalanan mereka yang tiada henti dalam memburu Avatar.

Di samping itu, ia juga harus menghadapi kelicikan Laksamana Zhao (Ken Leung) yang mulai terlibat di dalamnya. (berbagai sumber)



### PROFIL DIRI

Nama lengkap:  
**Ruy Iskandar**

Tempat lahir:  
**Indonesia**

Tanggal lahir:  
**27 Juni 1984**

Pekerjaan:  
**Aktor**

Tahun aktif:  
**2013 - sekarang**

Nama akun Instagram:  
**@ruyiskandar**



# SAMSUNG LUNCURKAN PERANGKAT WEARABLE KESEHATAN

**SAMSUNG** secara resmi telah meluncurkan cincin pintar Galaxy Ring di ajang Mobile World Congress (MWC) 2024, sebuah perangkat wearable yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran.

Cincin ini memiliki desain yang minimalis namun kokoh dan akan tersedia dalam pilihan warna perak platinum, emas, dan hitam keramik.

Menurut TheVerge, cincin tersebut terasa ringan saat dipakai dan tersedia dalam ukuran 5 hingga 13, di dalamnya terdapat label S hingga XL.

Besaran baterainya pun bervariasi tergantung ukuran cincinnya, mulai dari 14,5mAh hingga 21,5mAh.

Galaxy Ring akan menyertakan serangkaian sensor untuk melacak berbagai metrik kesehatan. Meskipun Samsung belum mengungkapkan rangkaian sensor lengkap Galaxy Ring, mereka bermitra dengan Natural Cycles untuk pelacakan kesuburan.

Terdapat juga fitur kesehatan seperti pelacakan tidur, pelacakan detak jantung, jumlah langkah, dan pola pernapasan.

Samsung mengatakan pengguna juga akan menerima saran kesehatan yang dipersonalisasi berdasarkan data tidur mereka.

Fitur unik lainnya adalah "My Vitality Score" dari Samsung, yang dirancang untuk mengukur kewaspadaan dan memberikan wawasan tentang kesiapan pemakainya secara keseluruhan.

Masukan akan datang melalui "Kartu Booster" yang berisi tips berbasis sains yang menggabungkan data tidur dan kesehatan lainnya.

Galaxy Ring akan berintegrasi dengan ekosistem Samsung Health yang ada, termasuk perangkat Galaxy Watch.

Meskipun harga pastinya masih belum diketahui, cincin tersebut dijadwalkan untuk dirilis akhir tahun ini. Demikian diumumkan Gizmochina, Senin (26/2).

Wearable Device adalah sensor dan alat yang menempel di tubuh dimana penggunaannya mengacu pada teknologi elektronik atau komputer yang digabungkan di dalam pakaian dan nyaman dipakai.

Alat elektronik yang kita pakai sehari-hari seperti jam tangan akan menjadi wearable device apabila memiliki konektivitas dan dapat terhubung dengan alat-alat canggih seperti laptop, ucap dr. Nurhadi.

Teknologi Wearable Device sangat memiliki dampak yang besar di bidang kesehatan dan kebugaran. Saat ini

terdapat banyak jenis Wearable Device seperti jam tangan pintar dan gelang pintar.

Beberapa fitur standar yang terdapat dalam jam tangan pintar atau gelang pintar antara lain penghitung jumlah langkah, pemantauan tidur, pemantauan detak jantung 24 jam, GPS, pengukur tekanan darah, pengukur suhu dan lain sebagainya.

Hal ini dapat memberikan self monitoring bagi penggunaanya.

Fitur-fitur wearable device tentunya akan sangat berguna apabila dapat digunakan oleh ibu hamil dan bersalin.

Penghitung jumlah langkah dan lokasi GPS dapat menjadi bukti bahwa ibu melakukan aktivitas fisik yang cukup, pemantauan tidur dapat menunjukkan kualitas tidur yang baik, pemantauan detak jantung, suhu, tekanan darah, pernafasan secara real time, dapat memprediksi lebih awal ibu tersebut mengalami suatu keadaan kegawatdaruratan. Karena tidak satupun kegawatdaruratan ibu hamil secara tiba-tiba.

Hal yang sebenarnya terjadi adalah kondisi menuju kegawatdaruratan tersebut tidak terpantau secara baik dan terus menerus.

Selain dapat digunakan untuk individu, wearable device ini bisa dimanfaatkan oleh institusi kesehatan seperti rumah sakit dan dinas kesehatan.

Untuk manajemen rumah sakit misalnya selama ini continues monitoring hanya ada di ICU, seorang yang sudah bisa pulang tapi membutuhkan pemantauan, kita bisa menggunakan teknologi ini. Alat-alat ini tidak hanya untuk pasien tapi juga untuk memobilisasi penelitian kesehatan ataupun dokter, bidan, perawat, yang sedang berada di rumah sakit tersebut.

Beberapa bahkan sudah menggunakan alat wearable device ini untuk kepatuhan cuci tangan dari tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit.

Bisa juga dipakai untuk di pusat rehabilitasi, orang tua yang membutuhkan pengawasan khusus.

Wearable device menawarkan peluang baru untuk mengukur gaya hidup dan perilaku secara akurat dan mendorong perubahan perubahan gaya hidup menuju sehat.

Wearable device juga dapat membantu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui akurasi data dan kemudahan pemantauan (Antara)



## PELUNCURAN GALAXY RING DI MWC 2024

# TIKTOK-TOKOPEDIA BANTU UMKM DI INDONESIA



**ANDRI**, seorang penjual pakaian berusia 40 tahun di pusat perbelanjaan Tanah Abang Jakarta Pusat, sibuk mengemas pakaian yang akan dikirim kepada pembelinya melalui ekspedisi dan sebelahnya terdapat tumpukan paket yang siap dikirim.

"460 paket untuk hari ini," katanya ketika Xinhua mengunjungi tokonya pada hari Minggu lalu. Fakta lucunya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang datang ke tokonya pada hari itu. Kebanyakan pelanggannya adalah pembeli online.

"Anda bisa melihat bahwa tidak seorang pun datang ke sini, tetapi ratusan orang memeriksa produk-

produk di akun toko online saya setiap hari berkat teknologi bernama toko online," katanya.

Andri mengatakan aplikasi toko online yang paling sering digunakannya, dan menarik paling banyak pelanggannya, adalah Tokopedia. Ribuan orang telah mengikuti akun toko miliknya dan ini membuat bisnisnya berkembang sehingga dia bisa mendapat Rp 30 juta (1.915 dolar AS) dalam sebulan. Pendapatan ini jauh lebih tinggi dibandingkan hanya Rp 4 juta rupiah (255 dolar AS) yang pernah dia dapatkan sebelum usaha toko online.

Tokopedia adalah perusahaan e-commerce raksasa Indonesia, sebuah

entitas bisnis dari Grup GoTo Indonesia yang merupakan perusahaan teknologi internet terbesar di negara itu. Entitas tersebut telah bergabung dengan platform media sosial Tiongkok, TikTok, sejak pertengahan Desember 2023.

Tokopedia, yang mayoritas sahamnya sekarang dikendalikan oleh TikTok, sedang memperkuat strategi bisnis untuk penjual lokal agar UMKM di Indonesia mendapat manfaat.

Andri mengatakan, dia mulai mendapatkan lebih banyak pembeli sejak menggunakan e-commerce TikTok sebelum penggabungan kedua perusahaan tersebut.

Serupa dengan Andri, Hana Maulida Rompas, seorang wanita berusia 39 tahun, juga menjual aksesoris wanita buatan tangan di toko online miliknya. Dia mengatakan bahwa sejak menjadi penjual di Tokopedia, Toko TikTok, dan beberapa aplikasi e-commerce lainnya di Indonesia, dia tidak perlu lagi menyewa rumah toko.

"Saya bisa menjual produk saya di rumah saja. Saya bisa mendapatkan lebih banyak pembeli tanpa perlu membayar sewa rumah toko bulanan," katanya kepada Xinhua baru-baru ini.

Pelatihan untuk UMKM yang diselenggarakan oleh TikTok didukung oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian BUMN. Inisiatif tersebut telah berjalan sejak tahun 2021.

Digitalisasi UMKM telah menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia karena telah menargetkan 30 juta UMKM untuk bergabung dengan platform digital pada tahun 2024. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, hingga Desember 2023, telah ada 27 juta UMKM yang melakukan bisnis secara online.

Loto Srinaita Ginting, staf ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM dari Kementerian BUMN Indonesia, mengatakan pemerintah akan terus mendukung program-program yang membantu UMKM bertransformasi sepenuhnya digital.

"Kami akan berupaya terus memfasilitasi dan membantu bisnis lokal untuk memperluas bisnis mereka ke pasar global melalui digitalisasi," kata Ginting (Lenteratoday)





# MANFAAT DIET RENDAH KARBOHIDRAT

## UNTUK KESEHATAN TUBUH

**PAKAR** nutrisi dari Klinik SENS, Deepak Pal menyebutkan diet rendah karbohidrat memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh.

Deepak menjelaskan, meskipun diet rendah karbohidrat memiliki banyak manfaat, tetap dianjurkan untuk memperhatikan kebutuhan dan kondisi tubuh sendiri sebelum memulai diet baru.

Dia juga mengingatkan setiap individu memiliki respon tubuh yang berbeda-beda saat menjalani diet tertentu sehingga diperlukan konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga profesional sebelum memulai diet ini. Berikut manfaat diet rendah karbon dilansir dari Hindustan Times pada Selasa:

### Penurunan berat badan

Biasanya diet rendah karbohidrat diterapkan untuk mengatur berat badan. Asupan makanan rendah karbohidrat memaksa tubuh untuk membakar lemak yang tersimpan untuk energi yang menyebabkan berat badan menurun.

### Memperbaiki kontrol kadar gula darah

Individu dengan resistensi insulin,

pradiabetes, atau diabetes tipe 2 bisa mendapatkan manfaat dari diet rendah karbohidrat karena pola makan tersebut membantu mengatur kadar gula darah.

Ketika menghilangkan atau mengurangi konsumsi beras atau gandum dalam pola makan, hal itu dapat membantu mengontrol kadar gula darah.

### Mengendalikan nafsu makan berlebihan

Beralih ke makanan dengan kandungan protein yang lebih tinggi dan asupan lemak sehat dalam diet rendah karbohidrat dapat membuat perut lebih merasa kenyang.

Dengan begitu, nafsu makan yang berlebihan dapat lebih dikendalikan sehingga mencegah makan berlebihan yang menyebabkan berat badan bertambah.

### Tingkat produksi energi yang lebih tinggi

Menurut Deepak, individu yang menerapkan diet rendah karbohidrat mungkin memiliki kejernihan mental yang lebih baik dan energi berkelanjutan. Hal tersebut membuat

tubuh menjadi lebih efisien dalam membakar lemak menjadi energi.

### Memperbaiki kadar trigliserida

Diet rendah karbohidrat sering dikaitkan dengan penurunan kadar trigliserida, yang bermanfaat bagi kesehatan jantung.

### Mengurangi risiko peradangan

Beberapa diet rendah karbohidrat menekankan pada makanan yang tidak diproses atau makanan yang tanpa melalui proses pengolahan tertentu. Diet ini dapat berkontribusi untuk mengurangi risiko peradangan dalam tubuh.

### Tekanan darah yang lebih baik

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa diet rendah karbohidrat dapat mengatur tekanan darah dengan lebih baik, yang merupakan faktor kunci dalam kesehatan jantung.

### Peningkatan kolesterol HDL

Meskipun dampaknya dapat bervariasi, beberapa individu mengalami peningkatan kolesterol high-

density lipoprotein (HDL) atau sering disebut sebagai kolesterol baik ketika menjalankan diet rendah karbon (Antar)



**KPK Geledah Rutan ... (dari Hal 1)**

**KOMISI** Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK dan menyita sejumlah alat bukti terkait perkara pungutan liar oleh pegawai di instansi tersebut.

"Dalam kegiatan tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti antara lain berbagai dokumen catatan kaitan penerimaan sejumlah uang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Ali mengatakan, temuan tersebut selanjutnya akan dipelajari untuk kemudian disertakan dalam berkas perkara para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

"Penyitaan dan analisis segera dilakukan untuk menjadi bagian dalam pemberitaan perkara dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Lebih lanjut Ali mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan tim penyidik internal KPK pada Selasa (27/2) di Rutan cabang KPK, meliputi Rutan di Gedung Merah Putih KPK, Rutan di Pomdam Jaya Guntur, dan Rutan KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu juga menegaskan penggeledahan tersebut adalah bagian komitmen KPK untuk segera memproses disiplin pegawai dan penyidikan perkara dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Rutan Cabang KPK.

Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK menyatakan 90 pegawai KPK bersalah dalam perkara pungli di Rutan KPK.

Sebanyak 78 pegawai terperiiksa dijatuhi sanksi berat berupa permohonan maaf secara langsung dan terbuka, sementara 12 lainnya akan diserahkan ke Sekretariat Jenderal KPK untuk pemeriksaan dan penyelesaian lebih lanjut.

"Jadi yang disidangkan hari ini ada enam berkas perkara seluruhnya berjumlah 90 orang terperiiksa. Tadi juga sudah diikuti bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024).

Diketahui, sebanyak 78 pegawai dikenai sanksi permintaan maaf, sedangkan 12 pegawai KPK lainnya diserahkan ke Inspektorat KPK untuk menjalani sanksi kepegawaian.

**Lebih dari 10 Orang Tersangka Pungli Rutan**

KPK juga telah mengusut kasus itu secara pidana. KPK menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan dengan lebih dari 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Lebih dari 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).

Kasus pungli rutan di KPK ditangani secara etik, disiplin kepegawaian, hingga pidana. Secara etik, 78 pegawai KPK telah dijatuhi sanksi buat berupa permintaan maaf.

Sebanyak 12 pegawai KPK lain juga mulai menjalani proses sanksi disiplin kepegawaian di Inspektorat KPK. Sementara di bagian pidana, kasus ini telah naik ke tingkat penyidikan. Ali mengatakan penuntasan kasus tersebut akan dilakukan secara menyeluruh.

"Namun sekali lagi butuh proses kan, butuh waktu untuk kemudian menyelesaikan baik itu hukuman disiplin, maupun proses penegakan hukum oleh Kedepuitan Penindakan KPK," katanya.

"Jadi membacanya keseluruhan dari kejadian di rutan cabang KPK ini harus utuh. Jangan kemudian hanya dipotong melihatnya dari sisi putusan Dewas dan dianggap selesai, itu keliru," tambahnya.

**3 Sisa Berkas Maret**

Kasus pelanggaran etik terkait pungutan liar atau pungli di Rutan KPK masih berlanjut. Ada tiga sisa berkas perkara kasus tersebut yang segera naik ke tahap persidangan etik di Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Anggota Dewas KPK Syamsudin Haris mengatakan sidang akan dilakukan pada pertengahan Maret 2024. Tepatnya, di antara tanggal 12 atau 13 Maret.

"Pertengahan Maret. Tanggal 12 atau 13 Maret," kata Syamsudin kepada wartawan, Rabu (28/2/2024).

Adapun KPK sendiri mengatakan ada lebih dari 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka saat ini.

"Lebih dari 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Kasus pungli rutan di KPK ditangani secara etik, disiplin kepegawaian, hingga pidana. Secara etik 78 pegawai KPK telah dijatuhkan sanksi buat berupa permintaan maaf.

Sebanyak 12 pegawai KPK lainnya juga mulai menjalani proses sanksi disiplin kepegawaian di Inspektorat KPK. Sementara di bagian pidana kasus ini telah naik ke tingkat penyidikan. Ali mengatakan penuntasan kasus tersebut akan dilakukan secara menyeluruh.

"Namun sekali lagi butuh proses kan, butuh waktu untuk kemudian menyelesaikan, baik itu hukuman disiplin, maupun proses penegakan hukum oleh Kedepuitan Penindakan KPK," katanya.

"Jadi membacanya keseluruhan dari kejadian di rutan cabang KPK ini harus utuh. Jangan kemudian hanya dipotong melihatnya dari sisi putusan Dewas dan dianggap selesai, itu keliru," sambung Ali.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta siap untuk mengambil langkah dalam

memproses pegawai bernama Hengki yang diduga terlibat dalam pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Apabila terbukti bersalah, kami akan melakukan proses selanjutnya dengan melibatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara," kata Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus.

Augustinus menjelaskan bahwa BKD akan bertanggung jawab dalam menentukan sanksi yang akan diberikan kepada Hengki. Meskipun begitu, hingga saat ini pihaknya belum menerima koordinasi atau pemberitahuan dari Dewan Pengawas atau Dewas KPK mengenai keterlibatan Hengki dalam kasus pungli di Rutan KPK.

Selain itu, dia juga mengkonfirmasi bahwa Hengki saat ini bekerja di Sekretariat DPRD DKI setelah dipindahkan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di mana sebelumnya ia bertugas di Rutan KPK.

"Hengki mulai bekerja di Sekretariat DPRD DKI sejak awal November 2022 dan sampai sekarang telah menunjukkan kinerja yang baik," katanya.

Augustinus menegaskan bahwa Hengki tidak pernah menerima teguran atau sanksi disiplin selama bekerja di Sekretariat DPRD DKI, sehingga tidak ada alasan untuk menonaktifkannya dari jabatannya.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa peristiwa di Rutan KPK pada 2018 bukan merupakan tanggung jawab mereka. "Namun, kami sepenuhnya mengikuti proses hukum terhadap Hengki terkait peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum dan Dewan Pengawas KPK," kata dia.

Permintaan maaf yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Majelis Etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK itu disampaikan di Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Terkait permintaan maaf pegawai KPK, Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel mempertanyakan, apakah aksi pungli ke 78 pegawai KPK ini cuma berlangsung satu kali atau bahkan lebih.

"Patut diduga kuat, lebih dari satu kali. Berarti mereka sesungguhnya adalah residivis," ujar Reza Rabu (28/2/2024).

Residivisme mereka, menurut Reza, tidak dihitung berdasarkan re-entry (berulang masuk lapas) atau re-punishment (berulang dijatuhi hukuman).

"Melainkan berdasarkan perhitungan bahwa para staf KPK telah mengulang-ulang perbuatan pungli mereka. Betapa pun baru satu kali ini aksi mereka terungkap lalu diproses etik," kata Reza.

"Nah, dengan status sebagai residivis, apakah cukup para staf itu menebus kesalahan mereka dengan permintaan maaf? Apalagi

permintaan maaf itu bukan berdasarkan inisiatif pribadi per pribadi, melainkan dipaksa lembaga," papar Reza.

"Ini terkesan teatrikal, ketimbang pertobatan substansial," katanya.

Jadi, berapa kali permintaan maaf yang bisa dianggap setara dengan residivisme mereka?

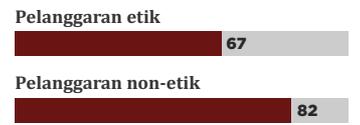
"Sebagai lembaga yang semestinya menempatkan standar etik dan standar moral pada posisi tertinggi dan mutlak, hukuman meminta maaf kosmetik oleh staf KPK tersebut sedemikian rupa jelas terlalu enteng," ujarnya.

Satu lagi, kata Reza, seandainya kepada para pelaku pungli itu dikenakan tes wawasan kebangsaan (TWK), akan seperti apa hasilnya?

"Atau mungkin memang tak perlu lagi mereka di-TWK. Bahwa mereka sudah menyimpang dari nilai-nilai integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan, itu saja sudah menunjukkan betapa wawasan kebangsaan mereka sedemikian bobrok," beber Reza.

"Jadi, pasca upacara permintaan maaf, 78 pegawai itu akan ditempatkan di mana? Ruang kerja yang mana yang masih layak diisi para pegawai itu? KPK bisa memastikan puluhan orang itu tidak akan mengulangi aksi pungli mereka?," katanya. (wid,rls,ist,ant/dya)

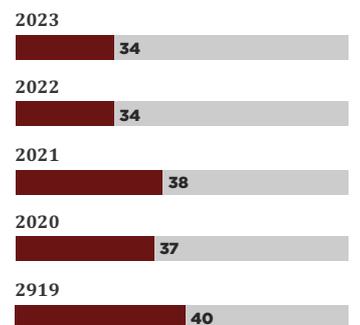
**JUMLAH LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITERIMA DEWAS KPK MENURUT JENISNYA (2023)**



**TIGA RUTAN DIGELEDAH**



**INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) INDONESIA (2019-2023)**



# Dari Uang Rp44,5 M Hasil Pemerasan SYL ke Bawahan, Rp40,1 Juta Mengalir ke NasDem

**JAKARTA** - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) didakwa melakukan pemerasan terhadap anak buahnya sebesar Rp44,5 miliar selama periode 2020-2023. Adapun penggunaannya untuk berbagai hal, mulai dari keperluan pribadi hingga partai Nasdem.

"Bahwa jumlah uang yang diperoleh Terdakwa selama menjabat Menteri Pertanian RI dengan cara menggunakan paksaan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebesar total Rp44.546.070.044," tutur jaksa KPK saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

Sebelumnya, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor dengan agenda pembacaan dakwaan. Dia didakwa memeras anak buahnya sebesar Rp44,5 miliar selama periode 2020-2023 dan menerima suap sebanyak Rp40 miliar perihal gratifikasi jabatan.

"Terdakwa selaku Menteri Pertanian RI periode tahun 2019 sampai 2023 meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, yaitu dari anggaran Sekretariat, Direktorat, dan Badan pada Kementerian RI sejumlah total Rp44.546.079.044," tutur Jaksa KPK Taufiq Ibnugroho saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

SYL disebut bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta, melakukan tindak pidana tersebut.

Diketahui, Muhammad Hatta merupakan staf dan orang kepercayaan SYL saat menjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan menggantikan Momon Rusmono yang dicopot SYL sebab dianggap tidak sejalan.

Sejak menjabat sebagai menteri, SYL ditengarai mengumpulkan dan memerintahkan Imam Mujahidin Fahmid selaku Staf Khusus, Kasdi, Hatta, dan Panji Harjanto selaku ajudan untuk melakukan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di Kementan RI. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi SYL dan keluarga.

Selain itu, SYL menyampaikan ada jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing Sekretariat, Direktorat, dan Badan pada Kementan RI.

"Terdakwa juga menyampaikan kepada jajaran di bawahnya apabila



Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah melakukan pemerasan sebesar Rp44,5 miliar. (Ant)

para pejabat eselon I tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa tersebut, maka jabatannya dalam bahaya, dapat dipindahtugaskan atau di-non job-kan oleh terdakwa, serta apabila ada pejabat yang tidak sejalan dengan hal yang disampaikan terdakwa tersebut agar mengundurkan diri dari jabatannya," jelas jaksa KPK.

Jaksa merinci uang puluhan miliar hasil dugaan rasuah itu digunakan antara lain untuk kepentingan istri dan keluarga SYL, kado undangan, Partai NasDem, acara keagamaan, sewa pesawat, bantuan bencana alam atau sembako, keperluan ke luar negeri, umrah, dan kurban.

Dalam perkara pemerasan ini, SYL disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Kemudian, SYL bersama Kasdi dan Hatta didakwa menerima gratifikasi yakni suap sebesar Rp40.647.444.494, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023. Dalam surat dakwaan, uraian mengenai delik gratifikasi tertulis sama dengan kasus dugaan pemerasan.

SYL bersama Kasdi dan Hatta pun tidak melaporkan penerimaan tersebut ke KPK dalam waktu 30 hari kerja, sehingga dianggap sebagai bentuk penerimaan gratifikasi.

"Perbuatan terdakwa tersebut haruslah dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Menteri Pertanian RI Tahun 2019-2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 12C ayat 1 dan 2 UU Tipikor," jaksa menandaskan.

Atas perkara gratifikasi tersebut,

SYL didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

SYL juga mengajukan permohonan penahanan. Hal itu disampaikan kuasa hukum SYL dalam persidangan.

"Untuk menyampaikan permohonan penangguhan penahanan adapun alasan permohonan penangguhan penahanan ini antara lain yang pertama, Pak Syahrul ini beliau sudah berumur 69 tahun dan paru-parunya itu sudah diambil separuh dan beliau butuh udara terbuka," kata kuasa hukum SYL usai pembacaan dakwaan.

Dia mengatakan SYL harus menjalani check-up rutin setiap Minggu di RSPAD Gatot Soebroto. Dia memohon majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersebut.

Ditemui sesuai persidangan, SYL tak menjelaskan detail terkait sakit yang dideritanya. Dia mengaku mempunyai sakit paru-paru.

"Saya punya paru-paru," kata SYL.

## NasDem Siap Kembalikan

Partai NasDem buka suara soal dakwaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dalam dakwaan SYL, disebutkan ada aliran uang korupsi sebesar Rp 40 juta untuk NasDem.

"Itu bantuan bencana alam ke Fraksi NasDem," kata Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni, Rabu (28/2/2024).

Wakil Ketua Komisi III itu menjelaskan, bencana alam yang dimaksud adalah Gempa Cianjur. Itu terjadi pada 21 November 2022.

Beberapa waktu lalu, Sahroni juga

sempat menjelaskan soal adanya aliran dana dari SYL. Namun, kala itu, nominal uang disebut sebesar Rp 20 juta.

"2 kali kalau enggak salah bantuannya untuk bencana alam," jelas Sahroni soal nominal yang kini disebut dalam dakwaan Rp 40 juta.

Partai NasDem siap mengembalikannya uang tersebut. "Kalau diminta kembalikan, ya kita kembalikan," katanya.

Syahrul Yasin Limpo didakwa menerima uang Rp 44,5 miliar dari hasil pungli di Kementerian Pertanian. Uang kemudian dipakai untuk keperluan pribadi SYL dan juga keluarganya. (Wid,rls,ist)

## RINCIAN PENGGUNAAN UANG RP44,5 MILIAR OLEH SYL ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

-  Keperluan istri terdakwa: **Rp938.940.000**
-  Keperluan keluarga: **Rp992.296.746**
-  Keperluan pribadi: **Rp3.331.134.246**
-  Kado undangan: **Rp381.612.500**
-  Partai Nasdem: **Rp40.123.500**
-  Lain-lain (acara keagamaan, operasional menteri dan pengeluaran yang tidak masuk dalam kategori yang ada): **Rp16.683.448.302**
-  Carter pesawat: **Rp3.034.591.120**
-  Bantuan bencana alam/sembako: **Rp3.524.812.875**
-  Keperluan ke Luar Negeri: **Rp6.917.573.555**
-  Umrah: **Rp1.871.650.000**
-  Kurban: **Rp1.654.500.000**